

KEPENTINGAN NASIONAL TURKI DALAM KONFLIK NAGORNO – KARABAKH TAHUN 2020-2023

Zulfikar Aditya Rahman¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Nagorno-Karabakh conflict, rooted in ethnic and territorial disputes between Armenia and Azerbaijan, has remained unresolved since the late Soviet era. Turkey has taken a firm position in support of Azerbaijan, driven by ethnic, cultural, and geopolitical proximity. This study aims to examine Turkey's national interests in the 2020–2023 Nagorno-Karabakh conflict, focusing on its security concerns, regional political ambitions, energy needs, and foreign policy strategy. Using a qualitative, descriptive-analytical method, the research analyzes Turkey's involvement through military aid, economic cooperation, and regional diplomacy. The theoretical framework is based on neorealism, emphasizing the anarchic nature of international politics and the necessity for power balancing. Turkey's engagement is interpreted as both an internal strategic necessity and a response to regional power dynamics, particularly its rivalry with Russia. Additionally, the study applies the concepts of national interest and foreign policy behavior, arguing that Turkey's actions reflect a broader ambition to become a dominant regional power. By supporting Azerbaijan, Turkey not only strengthens bilateral relations but also expands its influence in the South Caucasus. The research concludes that Turkey's involvement in the conflict is a calculated geopolitical move to secure its long-term strategic and economic interests in the region.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, foreign policy, neorealism, geopolitics, energy.

ABSTRAK

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik etnonasional yang berakar sejak masa Uni Soviet dan terus berlanjut hingga pecah kembali menjadi perang berskala besar pada tahun 2020. Dalam konflik ini, Turki menunjukkan keterlibatan aktif dengan memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Azerbaijan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Turki dalam keterlibatannya pada konflik Nagorno-Karabakh periode 2020–2023, serta bagaimana strategi kebijakan luar negeri Turki dibentuk dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan Kaukasus Selatan. Dengan menggunakan pendekatan neorealisme sebagai kerangka teoritik dan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterlibatan Turki dilandasi oleh tiga kepentingan utama, yakni: keamanan energi nasional, penguatan posisi geopolitik regional, dan pembangunan industri pertahanan. Dukungan terhadap Azerbaijan tidak hanya didorong oleh kedekatan historis dan etnis, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan luar negeri proaktif Turki untuk menyeimbangkan pengaruh Rusia dan memperluas pengaruhnya di wilayah pasca-Soviet. Penelitian ini menunjukkan bahwa Turki memanfaatkan konflik ini sebagai batu loncatan untuk memperkuat peran sebagai kekuatan regional, sekaligus sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan ekonominya, khususnya di sektor energi. Hasil temuan ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri negara-negara regional dalam sistem internasional yang bersifat anarkis.

Kata Kunci: Turki, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, kebijakan luar negeri, neorealisme, geopolitik, energi

PENDAHULUAN

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik berkepanjangan antara Armenia dan Azerbaijan yang berakar sejak era Uni Soviet. Meskipun wilayah ini secara hukum (*de jure*) merupakan bagian dari Azerbaijan, secara faktual (*de facto*) dikuasai oleh etnis Armenia. Konflik yang telah berlangsung sejak akhir 1980-an ini terus mengalami peningkatan eskalasi, hingga pecah kembali dalam bentuk perang berskala besar pada tahun 2020. Perang tersebut memakan ribuan korban jiwa dan diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia. Meskipun demikian, ketegangan antara kedua negara tetap berlangsung, dan insiden pertempuran kecil masih terus terjadi dari tahun ke tahun.

Turki memberikan perhatian yang cukup besar dalam rangka agenda kebijakan luar negerinya di wilayah Kaukasus, terutama Kaukasus Selatan, selain itu Turki juga memegang peranan penting dalam dinamika konflik ini, terutama karena kedekatan etnis, agama, dan budaya dengan Azerbaijan. Turki tidak hanya memberikan dukungan diplomatik, namun juga bantuan militer dan logistik selama konflik 2020. Dukungan tersebut merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri Turki yang menempatkan kawasan Kaukasus Selatan sebagai wilayah strategis. Kawasan ini terletak di antara dua perairan penting, yaitu Laut Kaspia dan Laut Mediterania, sehingga memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi tinggi bagi Turki yang mana menempatkan negaranya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kaukasus (InMind Institute, 2021).

Setelah runtuhnya Uni Soviet, wilayah Kaukasus Selatan menjadi ajang persaingan kekuatan besar dunia seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Turki, sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Azerbaijan, telah memainkan peran signifikan dalam mendukung Azerbaijan dalam konflik ini. Turki bukan hanya negara yang berbagi ikatan historis, budaya, dan linguistik dengan Azerbaijan, tetapi juga memiliki kepentingan geopolitik yang kuat di kawasan tersebut. Dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020, Turki tidak hanya memberikan dukungan diplomatik kepada Azerbaijan, tetapi juga turut terlibat secara langsung dalam bentuk bantuan militer dan logistik (Welt&Bowen, 2021).

Kedua negara yang berkonflik, Azerbaijan dan Armenia memiliki perbedaan mendasar secara etnis dan agama. Secara etnis, Azerbaijan lebih dekat kepada Turki sedangkan Armenia lebih dekat kepada Rusia. Mayoritas penduduk Azerbaijan beragama Islam dan mayoritas penduduk Armenia beragama Kristen. Kedua negara ini telah melalui berbagai peperangan dan konflik di masa lalu. Konflik Nagorno-Karabakh dimulai pada tahun 1987 ketika tanah yang disengketakan antara Azerbaijan dan Armenia memperoleh situasi regional konflik yang rumit ketika Uni Soviet runtuh. Nagorno-Karabakh berada di Kaukasus Selatan yang secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Secara etnis, 95% populasi yang ada di Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia. (welt& Bowen, 2021)

Perang atas sengketa wilayah ini terjadi selama kurang lebih enam tahun setelah Nagorno-Karabakh menyatakan secara resmi bergabung dengan Armenia dan menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Rusia memposisikan dirinya sebagai negara yang menengahi konflik ini dan berhasil mencapai gencatan senjata pada tahun 1994. Meskipun telah disepakati gencatan senjata, hubungan di antara kedua negara masih mengalami ketegangan. Kontak senjata masih terjadi di sepanjang garis gencatan senjata dan terjadi hampir setiap tahun sejak tahun 2010, dengan intensitas yang terus meningkat setiap tahun.

Dengan korban lebih dari 30.000 jiwa (Anna Y. Hartati, 2020), konflik ini semakin menarik perhatian dunia internasional namun mediasi yang kerap kali dilakukan oleh OSCE Minsk Group selama 30 tahun tidak juga membuahkan hasil, termasuk beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB (Iran Khalid, 2020).

Disisi lain Turki juga berusaha memposisikan dirinya sebagai kekuatan regional utama dengan meningkatkan keterlibatan aktif dalam berbagai isu di kawasan. Turki juga menyuarakan kritik terhadap OSCE Minsk Group—yang diketuai oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis—karena dianggap tidak netral dan tidak efisien dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh (Daria Isachenko, 2020). Konflik yang bereskalasi menjadi perang skala besar ini menjadikan prioritas tertinggi bagi Turki untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya. Turki menempatkan dukungannya terhadap Azerbaijan. Sejak tahun 1918 dan seterusnya Turki telah membantu Azerbaijan memperoleh kemerdekaannya (Faiz Ismailzade, 2).

Di sisi lain, dinamika internasional turut memperburuk situasi, dengan kehadiran kekuatan besar seperti Rusia yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Armenia dan memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan di wilayah tersebut. Namun, meskipun Rusia memiliki peran penting, Turki berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemain utama di kawasan ini, melalui kebijakan luar negeri yang lebih aktif, termasuk dalam konteks peranannya dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta aliansinya dengan negara-negara di Timur Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepentingan nasional Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh pada periode 2020–2023. Kepentingan tersebut mencakup aspek keamanan nasional, pengaruh politik regional, serta kepentingan ekonomi dan energi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana strategi kebijakan luar negeri Turki dibentuk untuk memperkuat posisi tawarnya di tingkat internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh dan dampaknya terhadap hubungan bilateral dan geopolitik regional.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Perspektif Neorealisme atau Realisme Struktural sebagai pendekatan analisis utama. Kenneth Waltz yang mengambil beberapa elemen realisme klasik sebagai landasan berpikirnya, contohnya tentang sistem anarki internasional. Asumsi mendasar dari pemikiran neorealisme adalah negara merupakan kesatuan, merupakan aktor yang secara fungsional sama dan merupakan satu-satunya aktor penting dalam politik internasional. Kedua sistem internasional dicirikan oleh anarki. Terakhir, penyebaran kapabilitas kekuasaan adalah hal pokok, dan dalam menjelaskan perilaku negara menggunakan variabel *system-level*. Asumsi lain secara khusus adalah neorealis percaya bahwa perang merupakan keadaan yang normal dalam hubungan internasional, dimana kedamaian hanya akan tercapai dalam *balance of power*. Kedua rezim internasional merupakan cerminan dari struktur kekuasaan. Terakhir, kerja sama internasional tidak mungkin terjadi di dalam sistem yang anarki kecuali adanya stabilitas hegemoni dimana ada satu negara yang menjadi regulator dengan menggunakan kapabilitas ekonomi dan militernya (Robert Jackson & Sorensen 1999).

Waltz menekankan bahwa perilaku negara dalam sistem internasional sangat

dipengaruhi oleh struktur sistem itu sendiri, yang bersifat anarkis—tanpa otoritas tertinggi. Dalam tatanan ini, setiap negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keberlangsungan hidupnya (survival) dan mempertahankan keamanannya. Waltz berpendapat bahwa stabilitas sistem internasional dapat tercapai melalui *balance of power* atau perimbangan kekuatan. Negara-negara akan menyeimbangkan kekuatan satu sama lain, baik melalui peningkatan kekuatan internal seperti militer dan ekonomi (internal balancing), maupun melalui pembentukan aliansi strategis (external balancing). Lebih lanjut, Waltz mengemukakan dua “faktor kembar” dalam sistem anarki yang mendorong negara untuk bertindak. Pertama, karena tidak ada otoritas pusat, negara bertanggung jawab penuh atas keamanannya sendiri. Kedua, adanya potensi ancaman dari negara lain yang memaksa negara untuk selalu waspada. Dalam konteks ini, aliansi terbentuk tidak hanya atas dasar kepentingan bersama, tetapi juga karena adanya kekhawatiran terhadap kekuatan lain yang dianggap sebagai ancaman. Aliansi ini bersifat strategis dan kolektif untuk menghadapi ancaman bersama dan mempertahankan stabilitas kawasan (Kenneth Waltz, 1979).

Dalam perkembangan lebih lanjut, neorealisme terbagi ke dalam dua pendekatan utama, yaitu *defensive realism* dan *offensive realism*. *Defensive realism*, sebagaimana yang dikemukakan Waltz, berargumen bahwa negara hanya perlu mengakumulasi kekuatan secukupnya untuk bertahan hidup, bukan untuk dominasi. Sementara itu, *offensive realism* berpandangan bahwa negara besar (*Great Power*) cenderung terus memperbesar kekuatan mereka guna mencapai posisi sebagai hegemon regional atau global. Negara akan menggunakan segala instrumen kekuasaan, baik yang bersifat militer maupun non-militer, untuk mencegah munculnya kekuatan besar baru yang berpotensi menjadi rival (Visensio Dugis, 2016).

Dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh, teori neorealisme dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Turki. Turki, sebagai kekuatan regional, terlibat aktif dalam konflik ini tidak hanya karena faktor kedekatan etnis dan budaya dengan Azerbaijan, tetapi juga karena tekanan dari struktur kekuasaan regional. Keterlibatan Turki mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kekuatan Rusia yang memiliki hubungan erat dengan Armenia. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Turki tidak semata-mata didorong oleh kepentingan internal, tetapi juga oleh keharusan untuk bertahan dan menjaga posisi strategisnya dalam sistem internasional yang kompetitif dan anarkis.

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultural dari gangguan negara lain, kepentingan nasional dapat menjadi alat bagi pemimpin negara untuk membuat kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama atau konflik (Theodore A. Columbus, 1978). Selain itu konsep kebijakan luar negeri menurut Laura Neack berpendapat, kebijakan luar negeri adalah serangkaian langkah pengambilan kebijakan yang tidak terlepas dari irisan (intersection) antara dimensi domestik dan sistemik. Dengan begitu, kebijakan luar negeri dibuat sebagai konsekuensi ketika pemerintah sebagai aktor utama menyesuaikan tindakan mereka dalam menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan domestik maupun internasional. Suatu negara dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan negara tersebut harus bisa beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di lingkungannya, dengan menyeimbangkan tekanan internal dan tuntutan eksternal sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasionalnya (Laura Neack,

2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yang metode ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta mengenai kepentingan nasional Turki dalam konflik Nagorno – Karabakh Tahun 2020-2023. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam bentuk kata verbal seperti gambaran umum objek penelitian dan sejarah kerja sama keamanan, sedangkan data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk angka seperti jumlah kekuatan militer negara-negara di Eropa Timur. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai bentuk seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya akan mendukung kelengkapan data sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konflik antara Azerbaijan dan Armenia berakar pada perbedaan etnis dan agama serta perebutan wilayah strategis Nagorno-Karabakh. Azerbaijan yang mayoritas Muslim dan memiliki kedekatan etnis dengan Turki, berseberangan dengan Armenia yang mayoritas Kristen dan lebih dekat dengan Rusia (Cory Welt & Andrew S. Bowen, 2021). Perselisihan keduanya telah berlangsung sejak runtuhnya Kekaisaran Rusia, dan terus berlanjut di bawah pemerintahan Uni Soviet. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, namun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Sejak tahun 1918, wilayah ini menjadi titik panas konflik bersenjata yang diperebutkan banyak kekuatan, termasuk Inggris, Rusia, dan Turki. Uni Soviet memberikan wilayah ini kepada Azerbaijan karena pertimbangan ekonomi dan geopolitik, tetapi gerakan separatis Armenia terus muncul, terutama pada era Gorbachev (Josh Wilson & David Parker, 2023). Konflik berskala besar pertama pecah pada tahun 1991–1994, yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsi, berakhir dengan kemenangan Armenia dan perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Rusia (Ronald Sunny, 2023). Namun, gencatan ini tidak menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Perang kembali meletus pada 2020, dengan Azerbaijan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah strategis termasuk Shusha, berkat dukungan militer Turki dan modernisasi alat perang melalui pendapatan minyak (Uzi Robin, 2020).

Upaya mediasi internasional oleh OSCE Minsk Group, Iran, dan Rusia sebagian besar gagal menghasilkan perdamaian permanen. Meskipun Dewan Keamanan PBB mengeluarkan empat resolusi untuk mendesak penarikan pasukan Armenia dan dimulainya negosiasi, implementasinya tidak efektif. Perjanjian gencatan senjata pada November 2020, yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia (Ali Askerof, 2020), mengukuhkan kemenangan militer Azerbaijan. Rusia dan Turki tampil sebagai aktor eksternal utama yang mengatur keseimbangan kekuasaan di wilayah Kaukasus. Namun, potensi konflik lanjutan tetap tinggi karena ketidakpuasan pihak-pihak yang terlibat dan kondisi politik domestik yang belum stabil, khususnya di Armenia.

A. Hubungan dan Dukungan Turki-Alzerbaizan

Dalam dinamika konflik Nagorno-Karabakh, keterlibatan Turki tidak dapat dilepaskan dari hubungan historis, etnis, dan budaya yang kuat dengan Azerbaijan. Konsep “*one nation, two states*” menggambarkan kedekatan identitas kedua negara yang berbagi akar bahasa, budaya Turki, serta solidaritas geopolitik yang sudah terbentuk sejak awal abad ke-20. Turki bahkan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan setelah runtuhnya Uni Soviet. Komitmen Turki terhadap Azerbaijan bukan semata simbolik, melainkan diwujudkan dalam bentuk nyata, baik dukungan diplomatik, logistik, maupun militer. Sejak konflik pertama pada awal 1990-an, Turki sudah menunjukkan keberpihakan yang eksplisit dengan memutuskan hubungan diplomatik dan menutup perbatasan dengan Armenia pada tahun 1993. Armenia pun dikecualikan dari berbagai proyek energi regional seperti jalur pipa TANAP dan BTC, yang menyebabkan dampak ekonomi signifikan bagi Armenia (Suzan Fraser, 2020).

Selama Perang Nagorno-Karabakh Kedua pada tahun 2020, Turki memperkuat posisinya sebagai sekutu utama Azerbaijan. Dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan senjata, pelatihan militer, hingga penasihat militer yang membantu dalam perencanaan operasi. Meski Turki tidak mengakui keterlibatan militer secara langsung, modernisasi militer Azerbaijan sebagian besar didukung oleh kolaborasi pertahanan kedua negara yang sudah dimulai sejak perjanjian militer tahun 1992. Turki juga secara tegas menolak gagasan gencatan senjata apabila pasukan Armenia masih menduduki wilayah Azerbaijan. Pandangan ini menegaskan bahwa Turki tidak melihat solusi damai dapat dicapai tanpa pemulihan integritas teritorial Azerbaijan. Pendekatan Turki bersifat ofensif-politik, yaitu membentuk tekanan terhadap Armenia sembari memperkuat posisi tawar Azerbaijan di arena internasional. Selain dimensi militer, faktor sejarah turut memperkeruh relasi Turki dan Armenia. Perselisihan tentang peristiwa 1915 – yang dianggap sebagai genosida oleh Armenia namun dibantah oleh Turki – menambah dimensi emosional dan historis dalam konflik ini. Ketegangan historis ini turut memperkuat penolakan Turki terhadap normalisasi hubungan bilateral dengan Armenia. Dengan demikian, dukungan Turki terhadap Azerbaijan bukan sekadar solidaritas etnis, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Di satu sisi, Turki berupaya menyeimbangkan pengaruh Rusia di kawasan Kaukasus; di sisi lain, ia memperkuat posisinya sebagai aktor regional yang aktif dalam urusan pertahanan, energi, dan stabilitas perbatasan selatan Rusia. Kemenangan Azerbaijan dalam perang tahun 2020 pun menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Turki telah mengubah dinamika konflik dan peta kekuatan regional secara signifikan.

Hubungan Turki dan Azerbaijan mengalami penguatan signifikan dalam dekade terakhir, terutama pasca Perang Nagorno-Karabakh Kedua tahun 2020. Turki memberikan dukungan diplomatik, militer, dan teknologi yang substansial kepada Azerbaijan, memperkuat konsep “*one nation, two states*”, yang secara simbolis ditegaskan melalui *Deklarasi Shusha* pada Juni 2021. Deklarasi ini menjadi bentuk konkret kemitraan strategis dan keamanan antara dua negara yang memiliki latar belakang geopolitik berbeda, yakni Azerbaijan sebagai bekas republik Soviet dan Turki sebagai anggota NATO. Dukungan Turki terhadap pembangunan kekuatan militer Azerbaijan telah berlangsung selama tiga dekade, mencakup pelatihan, pendidikan militer, dan transfer teknologi. Sebelum perang 2020, Azerbaijan telah memodernisasi armadanya secara besar-besaran, termasuk pembelian UAV Bayraktar TB2 dari Turki, yang memainkan peran kunci dalam dominasi udara

Azerbaijan dan menghancurkan infrastruktur militer Armenia. Penggunaan UAV ini terbukti efektif, dengan estimasi kerugian Armenia mencapai 4,8 miliar USD, termasuk hilangnya sekitar 40% inventaris militer (Hulya Kinik & Sinem Celik, 2021).

Turki menjadi penyuplai peralatan militer terbesar ketiga bagi Azerbaijan setelah Rusia dan Israel. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2020, nilai ekspor pertahanan Turki ke Azerbaijan mencapai 123 juta USD. Selain faktor teknologi, kedisiplinan militer dan efisiensi komando Azerbaijan merupakan hasil dari kolaborasi panjang dengan militer Turki sejak 1992. Secara politik, Turki mengkritik keras efektivitas OSCE Minsk Group dan peran negara-negara ketua bersama—AS, Prancis, dan Rusia—yang dianggap bias dan tidak berhasil menghasilkan solusi damai selama hampir 30 tahun (Daria Isachenko, 2020). Sebagai respons, Turki aktif menawarkan keterlibatan langsung dalam proses resolusi konflik. Meskipun dituduh mengirim tentara bayaran Suriah dan menggunakan jet tempur F-16 dalam konflik, tuduhan ini dibantah oleh Ankara. Upaya Turki untuk memainkan peran lebih besar dalam penyelesaian konflik juga menguntungkan Rusia. Armenia di bawah pemerintahan Nikol Pashinyan menjalin hubungan erat dengan AS, yang membuat Rusia kehilangan kendali atas proses negosiasi. Keterlibatan Turki membantu menciptakan keseimbangan strategis di kawasan dan, dalam jangka panjang, berkontribusi pada konsolidasi kembali pengaruh Rusia di wilayah Kaukasus, sekaligus mengesampingkan campur tangan Barat.

B. Kepentingan Nasional Turki dalam Konflik Nagorno-Karabakh

Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh tidak hanya didorong oleh solidaritas historis dan etnis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor domestik yang bersifat strategis. Mengacu pada teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Neack, analisis pada level domestik menyoroti bahwa kebutuhan ekonomi nasional, stabilitas pemerintahan, serta agenda politik internal turut membentuk arah kebijakan luar negeri. Dalam konteks Turki, keterlibatan ini berkaitan erat dengan kebutuhan akan pasokan energi, khususnya gas, serta potensi keuntungan ekonomi dan geopolitik dari konflik. Selain itu, konflik menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional Turki melalui pembuktian efektivitas teknologi militernya, terutama UAV. Kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan juga memainkan peran sentral dalam mendorong kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan proyektif, menjadikan konflik ini sebagai ajang penguatan posisi domestik dan regional Turki.

Selain pertimbangan historis dan strategi geopolitik, keterlibatan Turki dalam Perang Nagorno-Karabakh Kedua juga didorong oleh faktor domestik yang bersifat struktural. Berdasarkan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Laura Neack, faktor internal seperti kebutuhan energi, pembangunan industri pertahanan, serta stabilitas pemerintahan turut berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Turki. Secara khusus, faktor ekonomi menjadi elemen penting dalam mendorong dukungan Turki terhadap Azerbaijan. Dengan populasi lebih dari 80 juta dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, konsumsi energi di Turki meningkat tajam—dilaporkan sebagai yang tertinggi di antara anggota OECD dalam satu dekade terakhir. Ketergantungan energi terhadap impor mencapai lebih dari 90% untuk minyak dan hampir 99% untuk gas, menjadikan isu keamanan energi sebagai prioritas strategis nasional. Dalam konteks ini, Azerbaijan berperan sebagai salah

satu pemasok gas utama bagi Turki, terutama melalui proyek-proyek seperti TANAP (Fallahi & Vosoughi, 2018).

Dukungan militer Turki terhadap Azerbaijan bukan hanya manifestasi dari hubungan etno-kultural, tetapi juga sebagai bentuk pengamanan terhadap jalur energi regional. Sebelum meletusnya perang tahun 2020, ekspor industri pertahanan Turki ke Azerbaijan melonjak enam kali lipat, mencapai lebih dari 123 juta USD, termasuk penjualan UAV Bayraktar TB2 yang menjadi senjata penentu kemenangan Azerbaijan (Ulkar Matiqqzi, 2020). Kemenangan tersebut menghasilkan kontrak baru bernilai ratusan juta USD bagi Turki, memperkuat industri pertahanannya sekaligus memperbesar pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan. Dengan demikian, konflik Nagorno-Karabakh menjadi arena penting bagi Turki untuk mengintegrasikan kepentingan domestik—terutama ekonomi dan energi—ke dalam kebijakan luar negeri yang lebih aktif, proyektif, dan berorientasi pada penguatan kekuatan nasional

Selain itu Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan energi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Konflik ini dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan pengaruh Turki, baik di kawasan Kaukasus maupun dalam tataran global. Salah satu bukti keberhasilan strategi ini adalah pengaruh besar UAV buatan Turki—terutama Bayraktar TB2—dalam kemenangan Azerbaijan. Teknologi pertahanan ini menjadi simbol dominasi militer Azerbaijan sekaligus representasi dari kemajuan industri pertahanan nasional Turki. Turki, sebagai pemasok senjata terbesar ketiga Azerbaijan setelah Rusia dan Israel, mencatat lonjakan ekspor militer menjelang perang 2020. Data menunjukkan bahwa Azerbaijan mengimpor peralatan pertahanan dan penerbangan senilai 123 juta USD dari Turki dalam sembilan bulan pertama tahun itu. Capaian ini mencerminkan prinsip dasar kebijakan pertahanan Turki, yaitu mewujudkan kemandirian strategis dan mengurangi ketergantungan pada negara asing (Hulya Kinik & Sinem Celik, 2021). Industri pertahanan, yang dikembangkan secara intensif selama satu dekade terakhir, telah menjadikan Turki sebagai produsen UAV unggulan secara global.

Di balik pendekatan militer dan ekonomi tersebut, terdapat pula faktor personal yang signifikan: kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Erdogan memanfaatkan konflik Nagorno-Karabakh sebagai sarana untuk menegaskan visi Neo-Ottomanisme, yakni kebangkitan kembali pengaruh Turki di wilayah bekas Kekaisaran Ottoman. Dalam beberapa pernyataannya, Erdogan menegaskan bahwa misi Turki di Kaukasus merupakan kelanjutan dari warisan sejarah Ottoman (Pietro Shakarian, 2020). Ambisi geopolitik ini turut memperkuat kesan bahwa kebijakan luar negeri Turki bukan hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dan ekspansionis. Kepemimpinan Erdogan yang kuat dan populis menjadikan arah kebijakan luar negeri Turki sangat terpusat pada visinya. Ia dipandang sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan kebijakan luar negeri secara tegas dan dinamis, serta memainkan peran penting dalam menjadikan Turki aktor utama dalam konflik regional, termasuk Nagorno-Karabakh. Dari perspektif analisis kebijakan luar negeri, karakter pemimpin seperti Erdogan merupakan elemen penting dalam level analisis domestik, yang berdampak langsung pada pengambilan keputusan strategis negara. Dengan berhasil mengambil keuntungan dari kelumpuhan OSCE Minsk Group dan lemahnya posisi Armenia, keterlibatan Turki di konflik ini menjadi contoh nyata dari efektivitas kebijakan luar negerinya. Kemenangan Azerbaijan dalam perang selama 44 hari dianggap sebagai salah satu pencapaian strategis terbesar Turki dalam dekade terakhir. Kini, Ankara lebih lanjut

memfokuskan diri untuk memperkuat pengaruh politik, militer, dan ekonomi di Kaukasus Selatan, mempersempit ruang gerak kekuatan luar seperti Rusia dan negara-negara Barat, serta meneguhkan posisinya sebagai kekuatan regional yang disegani.

KESIMPULAN

Konflik yang bereskalasi menjadi perang skala besar ini menjadikan prioritas tertinggi bagi Turki untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya. Selama konflik ini berlangsung, Turki menempatkan dukungannya terhadap Azerbaijan. Konsep One nation-two states menjadi motivasi Turki dan Azerbaijan untuk saling mendukung satu sama lain pada kontestasi di wilayah Kaukasus Selatan. Kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat akan konsumsi energinya, membuat Turki harus mencari sumber energi baru yang aman dan terjangkau. Konflik Nagorno-Karabakh membuka peluang bagi Turki untuk mencapai kebutuhan nasionalnya dalam hal energi. Sumber energi tersebut didapatkan dari negara sahabat Turki yaitu Azerbaijan.

Azerbaijan menjadi pengeksport gas utama ke Turki, sedangkan Turki menjadi pemasok dan pendukung utama Azerbaijan dalam perlengkapan militer. Bantuan militer yang dilakukan oleh Turki berhasil membuat industri pertahanan Turki dipertimbangkan di dunia internasional. Kesuksesan penggunaan UAV buatan Turki dalam konflik menjadikan Turki sebagai salah satu produsen drone utama. Erdogan muncul sebagai sosok Presiden Turki yang begitu kuat. Erdogan cenderung begitu agresif untuk terlibat dalam permasalahan yang ada di kawasan. Dalam konflik Nagorno-Karabakh pun Turki dianggap sebagai negara yang memicu konflik ini kembali terjadi pada tahun 2020. Erdogan juga dianggap memiliki keinginan untuk memicu konflik lama dengan ambisi yang lebih tua, yaitu dengan melanjutkan rencana-rencana kebijakan luar negeri Kekaisaran Ottoman dahulu. Langkah-langkah Erdogan ini secara kasar dianggap sebagai Neo Ottomanisme, di mana Erdogan ingin membangkitkan kembali pengaruh Turki di kawasan dan menjadikan Turki kekuatan unggulan di lingkungan tersebut.

Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh memiliki ambisi untuk mengurangi pengaruh Rusia di kawasan. Selama konflik ini berlangsung, Turki mencoba untuk mengembangkan hubungan geopolitik yang kuat dengan Azerbaijan. Dengan begitu, Turki dapat mengurangi pengaruh Rusia di kawasan dan juga Turki dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia. Konflik ini juga terjadi pada wilayah yang terlewat oleh jalur utama transportasi energi yang berada di luar Nagorno-Karabakh Turki, dengan bersanding bersama Azerbaijan berharap bisa merebut kembali wilayah-wilayah penting tersebut agar Turki dapat mencapai kepentingan geopolitiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jackson, Robert dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Internet

Abilov, Shamkhal, "OSCE Minsk Group: Proposals and Failure, the View from Azerbaijan,"

- ResearchGate, Vol. 20, No. 1, (Januari 2018): 143-163.
- Aditya, Prasanna, "Neo-Ottomanism in Turkish foreign policy," Observer Research Foundation, (Agustus 2020).
- Ali, A. (2020). The Nagorno Karabakh Conflict-The Beginning of the Soviet End. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/339415817_The_Nagorno_Karabakh_Conflict_The_Beginning_of_the_Soviet_End.
- Dadparvar, Shabnam dan Azizi Saeed, "Exploring Turkey's Strategic Goals in Caucasus Region During the 2020 Nagorno-Karabakh Crisis." ResearchGate, Vol. 8, (November 2020): 475-482.
- Fariz Ismailzade, "Turkey-Azerbaijan: The Honeymoon Is Over," Transatlantic Policy Quarterly: 2.
- InMind Institute, "Lessons Learned From Turkey: Perspektif Sosial Politik, Budaya dan Global – Turki dan Hubungan Internasional," (Agustus 2021).
- Ishachenko, Daria, "Turkey–Russia Partnership in the War over Nagorno-Karabakh: Militarised Peacebuilding with Implications for Conflict Transformation." SWP Comment, No. 53, (November 2020).
- Jovic-Lazic, Ana, "The Role of Turkey in the second Armenian-Azerbaijani armed conflict over Nagorno-Karabakh as a reflection of continuity and change in its foreign policy," Vol. LXXIV, No. 1, (January 2022): 29-49.
- Khalid, Iram, "Nagorno-Karabakh Conflict," ResearchGate, (September 2020): 26.
- Khushudyan, Isabelle, Erin Cunningham dan Miriam Berger, "The Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan, explained," The Washington Post, (4 Agustus 2022).
- Kinik, Hulya dan Sinem Celik, "The Role of Turkish Drones in Azerbaijan's Increasing Military Effectiveness: An Assessment of the Second Nagorno-Karabakh War," Insight Turkey Fall, Vol. 23, No. 4, (December 2021).
- Liszkowska, Dominika, "Political leadership of Recep Tayyip Erdogan in selected analytical categories," ResearchGate, Vol. 2021, No. 3, (November 2021).
- Mammadov, Ali, "Economic Drivers Behind the Nagorno-Karabakh Conflict," Atlas Institute for International Affairs, (Juli 2021).
- Mianji, Jalaleddin Namini, "Turkey's Approach Toward the 2020 Karabakh War." Institute for Political and International Studies, (November 2020).
- Mustofa, Ahmad Z., "Analisis Kepentingan Rusia dan Turki dalam Konflik Armenia-Azerbaijan pada Tahun 2020." Jurnal PIR, Vol. 6 No. 1, (Agustus 2021):1-13.
- Neack, Laura. Studying Foreign Policy Comparatively: Case and Analysis, 4th ed. Miami: Miami University, 2019.

Pizzolo, Paolo, "Turkey in the South Caucasus: a trans-Eurasian connector." *Osservatorio sul Mediterraneo*, (Februari 2023).

Welt, Cory, dan Andrew S, Bowen, "Azerbaijan and Armenia: The Nagorno Karabakh Conflict." Congressional Research Service, (Januari 2021).

Wiku, Falentinoris, Ika R. Putranti dan Marten Hanura, "Kebijakan Luar Negeri Turki: Kesepakatan Turki kepada Rusia dalam Mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia Pasca Konflik Nagorno-Karabakh." *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3, (2022):312-324.

Yalcinkaya, Haldun, "Turkey's Overlooked Role in the Second Nagorno-Karabakh War," German Marshal Fund, (Januari 2021)